



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DODY SUKMONO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **13839**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.705.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **602.500.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA STAR SEPEDA MOTOR Tahun 1987, HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ BK5.1.5 RS CVT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
7. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT CKD Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **38.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **19.500.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.365.000.000
III. HUTANG	Rp.	635.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.730.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.